



LAPORAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. HULU SUNGAI SELATAN**

 *Kandangan, 71212*

 diskominfo@hulusungaiselatankab.go.id

 diskominfo.hulusungaiselatankab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena adanya kelemahan dalam tata kelola dan manajemen dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas/Badan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.



**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,**

Drs. HENDRO MARTONO, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19730309 199402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Peran Strategis	4
1.3 Sistematika Pelaporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja.....	12
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Pengukuran Kinerja	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja	22
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	44
3.5 Rekomendasi perbaikan Kinerja/ Rencana tindak lanjut di tahun 2026.....	46
3.6 Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Langkah Perbaikan	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran (RPJMD) dan Isu KLHS Yang Relevan	9
Tabel 2.2 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025-2029	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2025	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025 Perubahan	13
Tabel 2.5 Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Tahun 2025	14
Tabel 3.1 Pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025.....	22
Tabel 3.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.....	23
Tabel 3.3 Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja	43
Tabel 3.4 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024	44
Tabel 3.5 Rekomendasi perbaikan Kinerja/ Rencana tindak lanjut di tahun 2026	46
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS	2
Gambar 2.1 Bagan Sasaran Strategis Diskominfo Kab. HSS	8
Gambar 3.1 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2025	18
Gambar 3.2 Realisasi SPBE Tahun 2025 dan Target SPBE Tahun 2025.....	19
Gambar 3.3 Perbandingan Indeks SPBE Pemkab Hulu Sungai Selatan tahun 2025	19
Gambar 3.4 Nilai Indeks SPBE Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	20
Gambar 3.5 Nilai Indeks Tata Kelola SPBE tahun 2021-2025.....	23
Gambar 3.6 Nilai Indeks Tata Kelola SPBE Kab. HSS, Prov Kalsel dan Nasional	24
Gambar 3.7 Nilai Indeks Tata Kelola SPBE tahun 2021-2025.....	23
Gambar 3.8 Nilai Indeks Tata Kelola SPBE Kab. HSS, Prov Kalsel dan Nasional	24
Gambar 3.9 Tampilan website dan pengelolaan domain resmi pemkab	25
Gambar 3.10 Tampilan pengembangan aplikasi	26
Gambar 3.11 Rapat Koordinasi dan Evaluasi SPBE	26
Gambar 3.12 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Smartcity	26
Gambar 3.13 Peningkatan kapasitas 8 orang SDM TIK.....	27
Gambar 3.14 Laporan Audit Tik	27
Gambar 3.15 Nilai Indeks Layanan SPBE tahun 2021-2025	28
Gambar 3.16 Nilai Indeks Layanan SPBE Kab. HSS, Prov Kalsel dan Nasional	29
Gambar 3.17 Tampilan website dan pengelolaan domain resmi pemkab	30
Gambar 3.18 Tampilan lisensi pendukung pengembangan aplikasi.....	31
Gambar 3.19 Penyediaan bandwidth.....	31
Gambar 3.20 Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Tahun 2024 s.d 2025 dan target Tahun 2029	32
Gambar 3.21 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah Kab. HSS dan Nasional	33
Gambar 3.22 Kegiatan Peliputan	34
Gambar 3.23 Penyusunan dan Publikasi Informasi	34
Gambar 3.24 Publikasi Informasi pada Media	34
Gambar 3.25 Sarana Informasi Videotron.....	35
Gambar 3.26 Tampilan dashboard layanan pengaduan.....	35
Gambar 3.27 Kegiatan Perencanaan dan Pengumpulan Ewali Data	35
Gambar 3.28 Kegiatan Perencanaan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	36
Gambar 3.29 Tampilan dashboard satu data	36
Gambar 3.30 Nilai Indeks KAMI tahun 2025	37
Gambar 3.31 Nilai Tingkat Keamanan Informasi Tahun 2021 s.d 2025.....	37
Gambar 3.32 Nilai Tingkat Keamanan Informasi Kab. HSS dan Prov Kalsel	38
Gambar 3.33 Monitoring Sertifikat Keamanan	38
Gambar 3.34 Rapat Evaluasi Penerapan Keamanan Informasi.....	39
Gambar 3.35 Hasil Evaluasi Indeks KAMI	39
Gambar 3.36 Tampilan sertifikat tanda tangan elektronik elektronik	39
Gambar 3.37 Hasil Survey terhadap Layanan Internal Tahun 2025.....	40
Gambar 3.38 Jawaban Survey terhadap Layanan Internal Tahun 2025.....	40
Gambar 3.39 Sertifikat penghargaan penilaian keterbukaan informasi publik.....	52
Gambar 3.40 Sertifikat Pengelolaan Pengaduan LAPOR	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 memiliki lima sasaran strategis dengan total lima indikator kinerja, dan lima target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap lima target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE	4,1	3,3	80,49
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE	5	4,82	96,4
3	Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90,35	95,34	105,52
4	Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	461	602	130,59
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100	100	100
Rata-rata capaian					102,6

Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 10.677.648.313,- atau 81,96%, dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu Rp. 13.028.659.550,-.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kolaborasi internal maupun dengan pemangku kepentingan lain serta upaya inovatif sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri Tahun 2017, yang dulunya merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan diBidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sesuai peraturan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Perumusan kebijakan diBidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan diBidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan diBidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Evaluasi dan pelaporan kebijakan diBidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekertariat, 3 (tiga) Bidang. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

a) **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di dinas komunikasi dan Informatika;

- b. Pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kinerja program dan kegiatan di dinas komunikasi dan Informatika;
- c. Pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di dinas komunikasi dan Informatika;
- d. Pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di dinas komunikasi dan Informatika;
- e. Pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di dinas komunikasi dan Informatika;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di dinas komunikasi dan Informatika;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di dinas komunikasi dan Informatika;
- h. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. Koordinasi penyusunan laporan Kinerja, penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Teknologi dan Informatika

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra Pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan kePemerintahan menuju Smart City. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra Pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan kePemerintahan menuju Smart City;
- b. Penyusunan program pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra Pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan kePemerintahan menuju Smart City;
- c. Koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra Pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan kePemerintahan menuju Smart City;
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra Pemerintah daerah,

layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan kePemerintahan menuju Smart City;

- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra Pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan kePemerintahan menuju Smart City; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- b. Penyusunan program operasional di Bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di Bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di Bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai Bidang tugas.

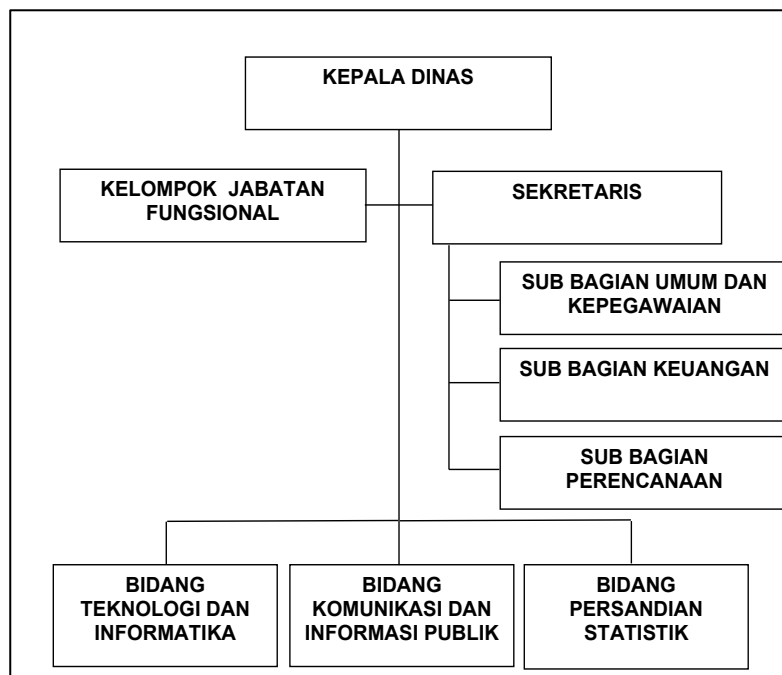
d) Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan program persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- d. Pengawasan dan pengendalian kebijakan di Bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;

- e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam Gambar berikut :



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS

1.2 Peran Strategis

Sesuai dengan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran strategis yaitu:

1. Urusan Komunikasi

Memiliki peran penting dalam pengelolaan konten dan penyebarluasan informasi, memastikan masyarakat memiliki akses yang adil dan akurat terhadap informasi program-program pemerintah. Untuk penyebarluasan informasi, terdapat beragam media yang digunakan. Berikut beberapa media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

- media cetak lokal / provinsi / nasional / majalah nasional;
- Media online lokal / provinsi / nasional;
- TV provinsi / nasional
- TV Kabel
- Radio lokal
- Baliho dan Videotron

Selain pengelolaan konten dan penyebarluasan informasi, urusan komunikasi juga mengampu pengelolaan informasi publik (PPID), pendokumentasian gambar dan audio visual kegiatan pemerintah dan pengelolaan pengaduan.

2. Urusan Informatika

Memiliki peranan penting dalam :

- pengelolaan dan pelayanan infrastruktur data center, jaringan TIK dan aplikasi;
- pengembangan intranet pemerintah dan penggunaan akses internet;
- melaksanakan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- pengelolaan domain dan subdomain di lingkungan pemerintah daerah;
- pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City;
- pengelolaan e-Government di lingkungan pemerintah daerah; dan

3. Urusan Statistik

Memiliki peran penting dalam :

- Penyusunan Kebijakan Teknis sebagai pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang meliputi tahap perencanaan data berupa identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data, pemeriksaan standar data dan metadata sesuai prinsip Satu Data Indonesia, penyebarluasan data berupa pendokumentasian hasil capaian pembangunan daerah serta penyebarluasan data melalui Portal Satu Data HSS
- Penyediaan data dalam pengambilan keputusan pimpinan daerah

4. Urusan Persandian

Memiliki peran penting dalam :

- Dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;
- Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;
- Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi;
- Pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi sandi;
- Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitasi/instalasi penting/vital/kritis melalui metode pengamanan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan strategis dalam berbagai permasalahan strategis antara lain:

a. Kurangnya SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SDM Bidang TIK masih tersebar diberbagai perangkat daerah, sementara untuk memenuhi kebutuhan SDM Bidang TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika mengangkat pegawai outsourcing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga diperlukan peningkatan kemampuan melalui diklat/bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan urusan komunikasi dan Informatika.

b. Infrastruktur Telekomunikasi

Walaupun telekomunikasi bukan merupakan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, namun peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyambung masyarakat akan kebutuhan akses telekomunikasi

di daerah sangat dirasakan. Tidak semua desa tercover jaringan telekomunikasi dikarenakan kondisi geografis berupa wilayah pegunungan, rawa dan dataran serta penyebaran penduduk tidak merata. Melalui koordinasi dan komunikasi dengan para penyelenggara telekomunikasi berkaitan dengan layanan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain penyampaian usulan penambahan dan peningkatan sinyal tower bts, menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan untuk dilakukan perbaikan.

c. Infrastruktur E-Government

Tidak semua OPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhubung dengan akses internet, jikapun terhubung dengan akses internet hanya menggunakan akses internet Vsat dengan bandwidth yang terbatas dan biaya sewa akses internet yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan menyewa akses internet Fiber Optik. Akses internet masih berdiri sendiri di masing-masing instansi/OPD dan masih banyak instansi/OPD yang belum tersedia akses internet.

d. Aplikasi *E-Government*

Tidak semua aplikasi Pemerintah Pusat dapat terintegrasi dengan aplikasi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten. Belum optimalnya pengelolaan aplikasi pengaduan yang bersinergikan dengan media sosial serta tersajikan di dashboard bagi masyarakat, pengelola pengaduan dan pimpinan. Sebagian besar aplikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten belum berbasis web dan mobile.

e. Regulasi

Masih adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan Informatika yang masih tersebar di berbagai Perangkat Daerah sehingga masih terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Perumusan regulasi daerah yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

f. Statistik Sektoral

Masih belum optimalnya penyelenggaraan urusan statistik sektoral dimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah belum sepenuhnya dilaksanakan. Kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data yang tidak saja menjadi rujukan Pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Untuk itu diperlukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga ketika di release/diseminasi masyarakat dapat dengan mudah memahami, namun kurangnya SDM yang menangani urusan statistik juga menjadi kendala terhadap terlambatnya informasi yang direlease melalui website.

g. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian belum dilaksanakan secara optimal selain masalah SDM persandian yang belum optimal, ditambah lagi dengan peralatan dan regulasi yang belum mendukung di Pemerintah daerah.

h. Komunikasi dan Informasi Publik

Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi, media luar ruang, internet, radio, koran, dan media lainnya. Namun demikian, penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah daerah saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh.

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, **Prioritas Nasional/Kabupaten, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029 yaitu “**Membangun Desa Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi & Teknologi (SEMANGAT)**”, serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terfokus pada Tujuan ke 4 (Empat) yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**”, pada sasaran yaitu “**Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital**”. Adapun gambaran tujuan ke 4 (Empat) serta sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 2.1 Bagan Sasaran Strategis Diskominmfo Kab. HSS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan daerah, Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD, Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran (RPJMD) dan Isu KLHS Yang Relevan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu Klhs Yang Relevan Dengan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan regulasi, Penilaian dan indikator dari SPBE ke Pemerintah Digital (PEMDI). 2. Belum tercapainya nilai maksimal tingkat kematangan Arsitektur, Peta Rencana, Keterpaduan rencana Anggaran, dan Proses Bisnis. 3. Belum terintegrasinya semua layanan publik pada satu portal. 	Peningkatan efisiensi birokrasi, pengurangan penggunaan kertas (emisi karbon), dan peningkatan transparansi layanan yang mendukung tata kelola berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Transformation, 2. Smart Governance, Citizen-Centric Services 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital (Pemerintahan Digital). b. Evaluasi SPBE oleh KemenPAN-RB. c. Program Satu Data Indonesia. 	Program <i>Smart City</i>	Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi baik
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra perangkat daerah yang disebabkan belum semua unit terhubung dengan jaringan intra. 5. Layanan Pengaduan belum maksimal 6. Pusat Data (Data Center) yang Tidak Standar. 	Pemerataan akses informasi sebagai hak dasar (aspek sosial), dan isu efisiensi energi pada pusat data (Green Data Center).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Divide (Kesenjangan Digital) 2. Internet of Things (IoT) 3. Cloud Computing 	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Palapa Ring & BTS BAKTI Kominfo. b. Kebijakan Pusat Data Nasional (PDN). c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional. 	Kesenjangan digital	Layanan Publik Berbasis Elektronik Optimal
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan	<ol style="list-style-type: none"> 7. Diseminasi Informasi yang Bersifat Top-Down dan Seremonial. 	Peningkatan partisipasi publik dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Era Post-Truth 	<ol style="list-style-type: none"> a. Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi). 	Pengelolaan Isu Sensitif	Informasi Dan Komunikasi Publik Terkelola dengan Baik

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu Klhs Yang Relevan Dengan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.	8. Pengelolaan Media Sosial yang Belum Optimal. 9. Kesenjangan Kompetensi (Skill Gap) yang menyebabkan kurangnya kualitas publikasi informasi dan komunikasi publik.	pembangunan (aspek sosial) dan penyebaran informasi terkait isu-isu lingkungan hidup strategis kepada masyarakat.	2. Digital Public Sphere (Ruang Publik Digital)	b. Penanganan Hoaks dan Disinformasi c. Tuntutan transparansi informasi publik.		
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	10. Belum Optimalnya Penerapan Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan. 11. Penerapan manajemen risiko keamanan siber yang belum Optimal.	Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia (aspek sosial) dan menjaga stabilitas layanan publik yang krusial bagi kehidupan masyarakat (aspek sosial-ekonomi).	1. Meningkatnya serangan siber global (Ransomware, Phishing) 2. Cyber Espionage	a. Implementasi UU PDP No. 27/2022. b. Pembentukan CSIRT c. Insiden keamanan siber	Kerentanan Pada Infrastruktur Kritis	Sistem Informasi Pemerintahan Terjamin Keamanannya

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan lima Sasaran Strategis beserta indikator dan target yang ingin dicapai sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital		Indeks SPBE (Indeks Pemerintah Digital 2026 s.d 2029)	4,17	1,56	1,84	1,98	2,23
2		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE (Indeks Teknologi Digital 2026 s.d 2029)	4,1	2	2,25	2,5	3
3		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE (Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 2026 s.d 2029)	5	1,33	1,66	1,8	2
4		Meningkatnya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90,35	90,40,	90,50	90,75	91
5		Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi (Indeks Aspek Keamanan Siber 2026 s.d 2029)	461	1,7	2	2,24	2,7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
6		Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100	100	100	100	100

2.2 Perjanjian Kinerja 2025

Upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bulan Januari tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE	4.1 Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE	5 Indeks
3	Meningkannya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90.35 Nilai
4	Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	461 Nilai
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %
PROGRAM			ANGGARAN
2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 6.245.960.440,00
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			Rp 3.717.085.050,00

2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 2.415.858.002,00
2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 116.994.321,00
2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 139.239.850,00

Pada Bulan Agustus 2025, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan anggaran. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE	4.1 Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE	5 Indeks
3	Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90.35 Nilai
4	Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	461 Nilai
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %
PROGRAM			ANGGARAN
2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 5.963.990.117,00
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			Rp 3.743.716.450,00
2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Rp 2.994.718.987,00
2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Rp 93.794.146,00
2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			Rp 232.439.850,00

Laporan kinerja ini, diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 di atas.

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.428.987.349,- namun dalam rangka efisiensi anggaran, anggaran mengalami pengurangan sebesar Rp. 759.361.686,- (5,99%) sehingga menjadi sebesar Rp 12.669.625.663,-

Pada Rencana Kerja dan anggaran perubahan tahun 2025, terdapat penambahan anggaran kembali sebesar Rp 359.033.887,- (2,76%) sehingga menjadi Rp13.028.659.550,-

Rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Tahun 2025

Program-Kegiatan	RKA murni (Rp)	RKA efisiensi (Rp)	RKA perubahan (Rp)	Ket
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatenkota	6.329.210.440	6.245.960.440	5.963.990.117	
Kegiatan :Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.748.000	11.748.000	11.748.000	
Sub Kegiatan :Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.332.000	7.332.000	7.332.000	
Sub Kegiatan :Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.416.000	4.416.000	4.416.000	
Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.576.290.148	5.576.290.148	5.086.935.691	
Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	5.571.520.148	5.571.520.148	5.082.165.691	
Sub Kegiatan :Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanantriwulanansemesteran Skpd	4.770.000	4.770.000	4.770.000	
Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Sub Kegiatan :Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Kegiatan :Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.196.332	172.446.332	327.791.066	
Sub Kegiatan :Penyediaan Komponen Instalasi Listrikpenerangan Bangunan Kantor	3.819.250	3.819.250	3.819.250	

Program-Kegiatan	RKA murni (Rp)	RKA efisiensi (Rp)	RKA perubahan (Rp)	Ket
Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.000.002	55.250.002	68.369.002	
Sub Kegiatan :Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	13.689.580	13.689.580	13.689.580	
Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	13.687.500	13.687.500	13.687.500	
Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	163.000.000	86.000.000	162.000.000	
Sub Kegiatan :Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			66.225.734	
Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.947.800	320.447.800	332.487.200	
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Surat Menyurat	374.000	374.000	374.000	
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	183.120.800	183.120.800	195.160.200	
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.453.000	136.953.000	136.953.000	
Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.028.160	145.028.160	185.028.160	
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.200.000	117.200.000	117.200.000	
Sub Kegiatan :Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	27.828.160	27.828.160	27.828.160	
Sub Kegiatan :Pemeliharaanrehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			40.000.000	
Program : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.717.085.050	3.468.265.050	3.743.716.450	
Kegiatan :Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupatenkota	3.717.085.050	3.468.265.050	3.743.716.450	

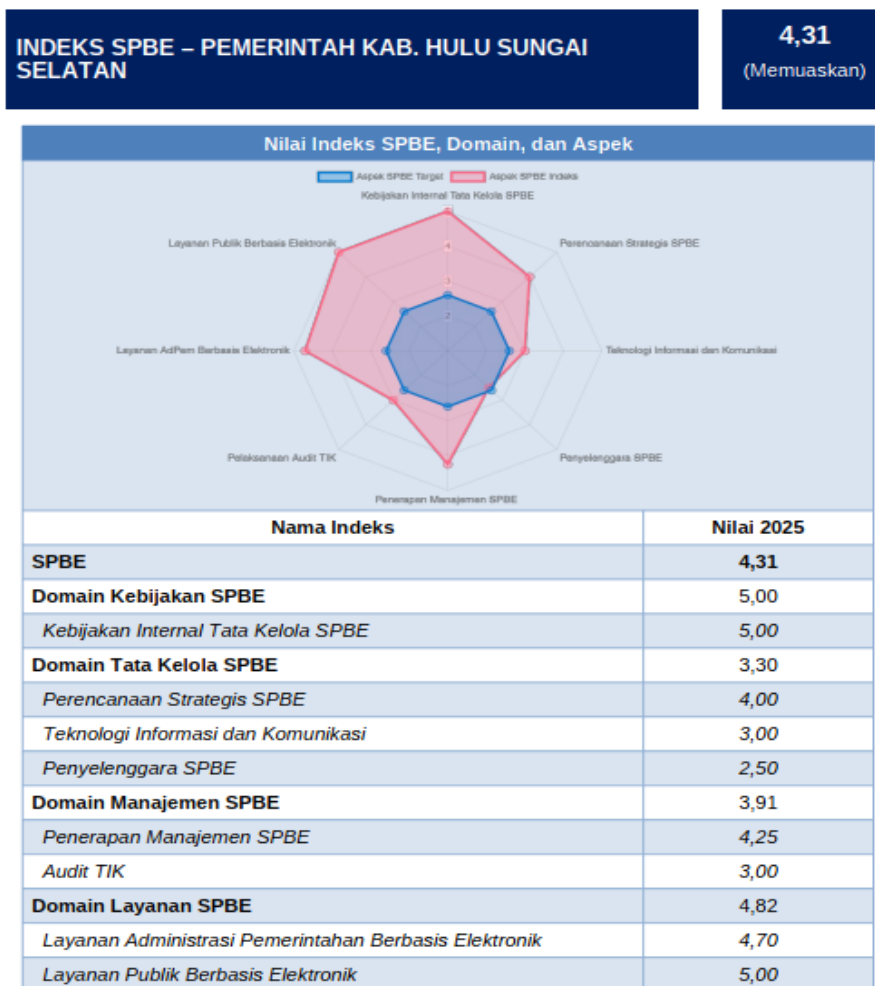
Program-Kegiatan	RKA murni (Rp)	RKA efisiensi (Rp)	RKA perubahan (Rp)	Ket
Sub Kegiatan :Diseminasi Informasi	981.369.890	864.148.890	1.093.321.190	
Sub Kegiatan :Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.735.715.160	2.604.116.160	2.650.395.260	
Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.058.952.002	2.699.166.002	2.994.718.987	
Kegiatan :Pengelolaan E Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupatenkota	3.058.952.002	2.699.166.002	2.994.718.987	
Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	31.800.000	31.800.000	31.800.000	
Sub Kegiatan :Pembangunan Danatau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah	251.508.000	251.508.000	252.606.125	
Sub Kegiatan :Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten Atau Kota Cerdas	366.924.002	242.138.002	322.462.862	
Sub Kegiatan :Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Spbe	2.408.720.000	2.173.720.000	2.146.850.000	
Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dan/Atau Reviu Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah			241.000.000	
Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	140.500.007	116.994.321	93.794.146	
Kegiatan :Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupatenkota	140.500.007	116.994.321	93.794.146	
Sub Kegiatan :Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	140.500.007	116.994.321	93.794.146	
Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	183.239.850	139.239.850	232.439.850	
Kegiatan :Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupatenkota	183.239.850	139.239.850	232.439.850	

Program-Kegiatan	RKA murni (Rp)	RKA efisiensi (Rp)	RKA perubahan (Rp)	Ket
Sub Kegiatan :Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupatenkota	65.890.250	45.890.250	65.890.250	
Sub Kegiatan :Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupatenkota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	109.974.600	85.974.600	138.974.600	
Sub Kegiatan :Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupatenkota	7.375.000	7.375.000	27.575.000	
Jumlah	13.428.987.349	12.669.625.663	13.028.659.550	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

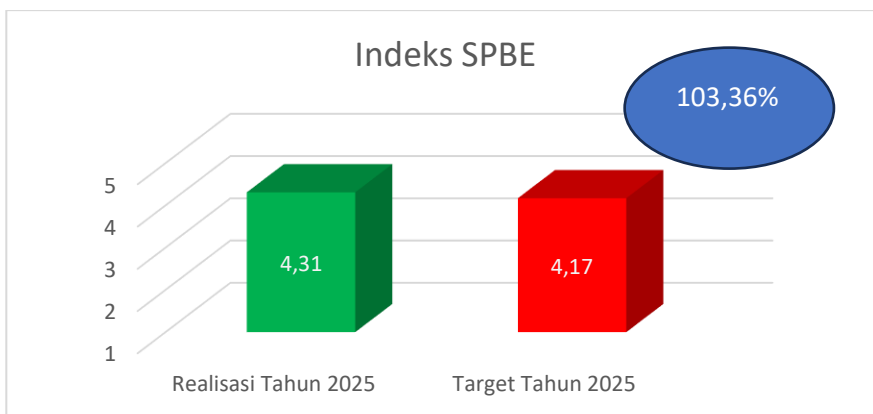
Sebagaimana tercantum dalam renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif dengan indikator Indeks SPBE dan target di tahun 2025 sebesar 4,17. Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat nilai Indeks SPBE sebesar 4,31.



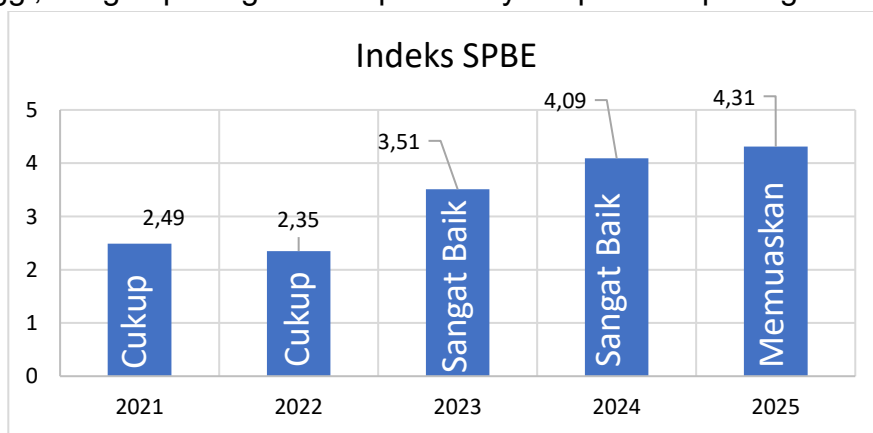
Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2025 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Gambar 3.2 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2025

Realisasi ini melebihi dari target senilai 4,17, dengan capaian sebesar 103,36%.

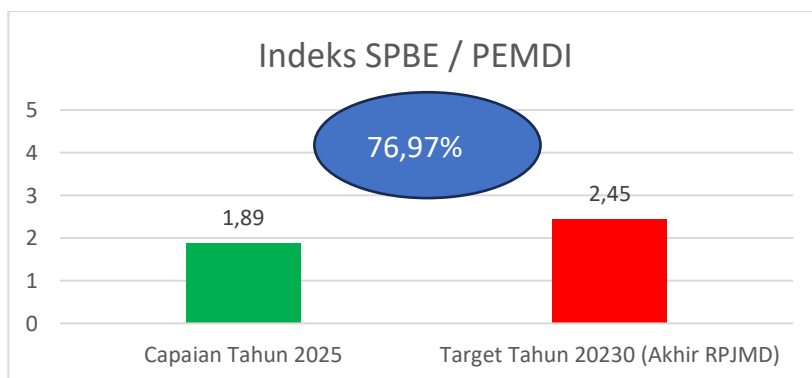


Gambar 3.2 Realisasi SPBE Tahun 2025 dan Target SPBE Tahun 2025
 Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun ini lebih tinggi, dengan peningkatan tiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:



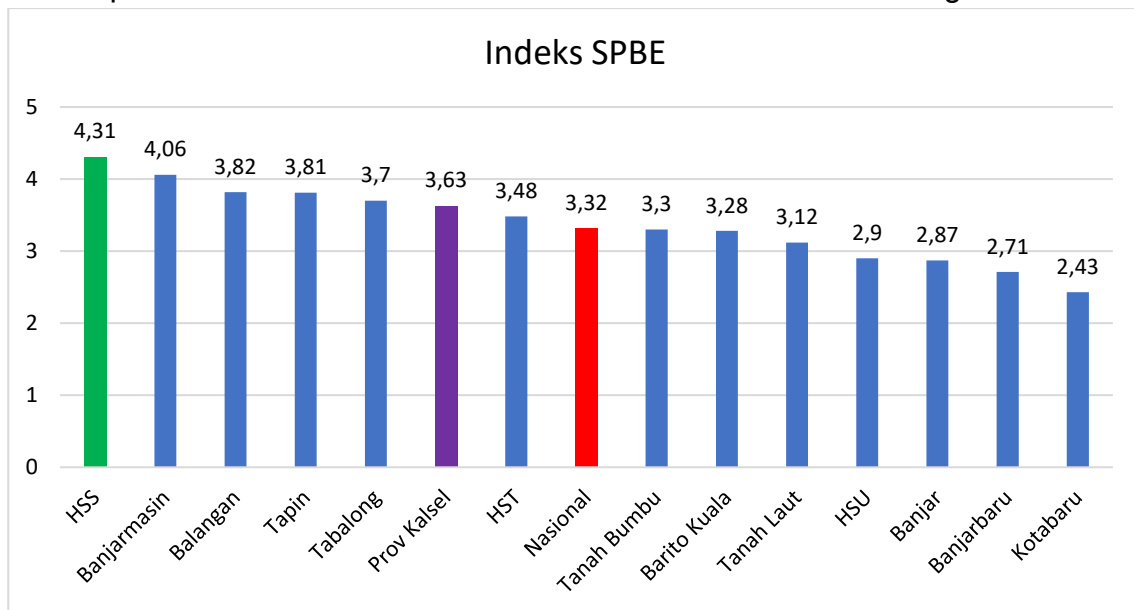
Gambar 3.2 Indeks SPBE Pemkab Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2025

Sebagaimana tabel di atas, capaian Indeks SPBE di Tahun 2025 mencapai skor 4.13 atau sebesar 103,36%. Untuk Tahun 2026 dan seterusnya Indeks SPBE diganti dengan Indeks Pemerintah Digital, untuk capaian Indeks SPBE Tahun 2025 apabila dikonversi ke Indeks Pemerintah Digital maka Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 sebesar 1,89. Jika dibandingkan dengan target Indeks Pemerintah Digital pada akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 2,45 capaian tahun 2025 telah mencapai 76,97%.



Gambar 3.3 Perbandingan Indeks SPBE Pemkab Hulu Sungai Selatan tahun 2025

Dibandingkan dengan capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten dan kota lain di provinsi Kalimantan Selatan, maka capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada urutan 1, dibandingkan dengan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan sebesar 3,63, maka Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih tinggi dari capaian Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dibandingkan dengan capaian di Tingkat nasional capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih tinggi dari capaian Indeks SPBE Nasional dengan Nilai 3,32. Indeks SPBE Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2. Nilai Indeks SPBE Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif dengan indikator Indeks SPBE terdapat factor pendorong dan penghambat capaian tersebut, yaitu:

1. Faktor Pendorong

- Kebijakan SPBE

Telah memiliki Kebijakan SPBE di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Tata Kelola SPBE

Telah memiliki Kebijakan Tata Kelola SPBE di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 167 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026. Penggunaan Sistem Sistem Penghubung Layanan, adanya SOP Pembuatan Aplikasi, serta dibentuknya Tim Koordinasi SPBE.

- Manajemen SPBE
Sudah diterapkannya manajemen pada aspek Risiko SPBE, Keamanan Informasi, Pengetahuan, Perubahan dan Layanan SPBE.
- Layanan SPBE
Telah optimalnya Pemanfaatan Layanan berbasis elektronik pada 10 Layanan Internal dan 6 Layanan Publik yang menjadi layanan wajib SPBE.

2. Faktor Penghambat

- Tata Kelola SPBE
Belum terpadunya Rencana dan Anggaran SPBE, karena belum adanya SOP mengenai Rencana dan Anggaran SPBE. Belum adanya SOP yang jelas mengenai Layanan Pusat Data dan Jaringan Intra, serta belum adanya kolaborasi dengan pihak eksternal pemerintah kabupaten, seperti akedemisi maupun swasta.
- Manajemen SPBE
Masih belum optimalnya penerapan manajemen pada aspek Aset TIK dan Sumber Daya Manusia pada bidang Teknologi.

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 102,6% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Mengacu pada hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE	4,1	3,3	80,49
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE	5	4,82	96,4
3	Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap	90,35	95,34	105,52

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Informasi Pemerintah Daerah			
4	Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	461	602	130,59
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100	100	100
Rata-rata capaian					102,6

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis kinerja untuk setiap sasaran Adalah sebagai berikut:

1) Sasaran: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Tata Kelola SPBE	4,1	3,3	80,49%

Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Capaian Indeks Tata Kelola SPBE tahun 2025 sebesar 3,3. Capaian tersebut lebih rendah dari target yaitu 4,1, dengan capaian sebesar 80,49%.

Catatan : bobot nilai

Domain Tata Kelola SPBE	3,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	4,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50

Pengukuran Indeks Tata Kelola SPBE terdiri dari 3 aspek dengan rincian dan hasil untuk tahun 2025 sebgai berikut:

a. Perencanaan Strategis SPBE

Pada aspek ini kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah dan Peta Rencana SPBE sudah mencapai nilai maksimal dengan ditetapkannya ditetapkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 167 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026. Untuk Kematangan Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE masih mendapat nilai tengah, karena belum terpadunya anggaran dan inovasi SPBE.

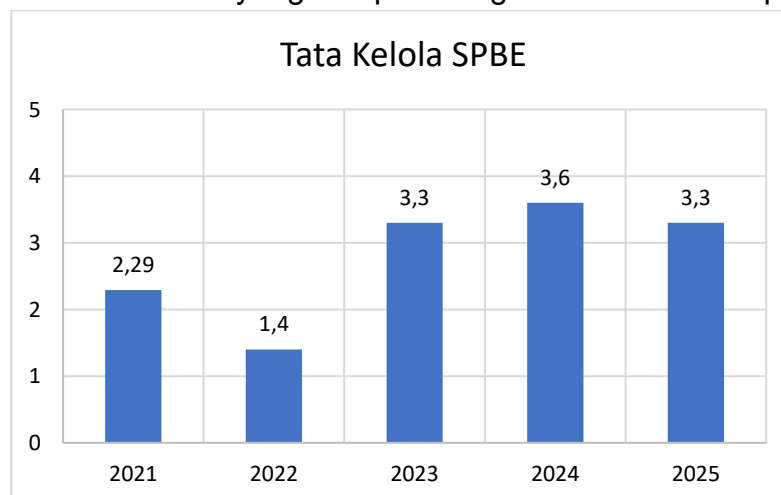
b. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada aspek ini kematangan Pembangunan Aplikasi dan penggunaan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sudah mencapai nilai maksimal karena telah tersedianya SOP pembuatan Aplikasi beserta helpdesk layanannya dan penggunaan portal untuk penghubung aplikasi antar layanan.

c. Penyelenggaraan SPBE

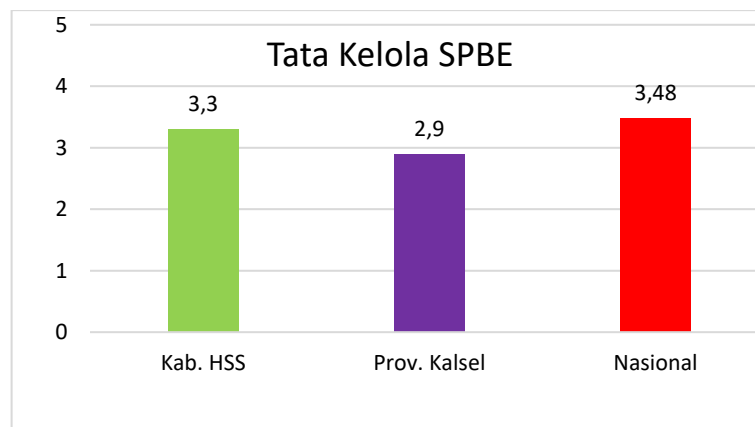
Pada aspek ini kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE sudah baik dengan dibentuknya Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Hulu sungai selatan disertai dengan penyelenggaraan rapat koordinasi, pembuatan rencana kerja tim serta evaluasi. Pada aspek ini aspek yang masih rendah berupa Kolaborasi Penerapan SPBE, karena kurangnya kolaborasi penerapan SPBE dengan pihak eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik Swasta, Instansi Pendidikan maupun pihak lainnya.

Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 yang sempat mengalami kenaikan capaian.



Gambar 3.7 Nilai Indeks Tata Kelola SPBE tahun 2021-2025

Capaian Indeks Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan dengan capaian provinsi dan capaian nasional sebagai berikut:



Gambar 3.8 Nilai Indeks Tata Kelola SPBE Kab. HSS, Prov Kalsel dan Nasional Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah Penggunaan Indikator Indeks Tata Kelola SPBE dilakukan sampai dengan tahun 2025, untuk tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 (akhir renstra) digunakan indikator Indeks Teknogi Digital karena adanya Pergantian Pengukuran Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Analisis penyebab kegagalan

Capaian Indeks Tata Kelola SPBE pada Tahun 2025 tidak mencapai target disebabkan :

1. Belum terpadunya rencana dan anggaran SPBE
Dokumen seperti arsitektur dan peta rencana SPBE sudah tersedia tetapi penganggaran untuk SPBE masih tersebar di masing-masing perangkat daerah dan belum berpatokan pada arsitektur dan peta rencana SPBE.
2. Koordinasi Inovasi Proses Bisnis SPBE antar unit kerja lemah
Pelaksanaan SPBE masih berjalan sektoral belum terintegrasi antar OPD/unit, sehingga setiap layanan proses bisnis perangkat daerah berjalan masing-masing.
3. Keterbatasan SDM TIK dan pemahaman SPBE
Jumlah dan kompetensi SDM pengelola SPBE belum memadai, termasuk kurangnya pemahaman terhadap indikator penilaian SPBE.
4. Proses bisnis belum terdigitalisasi dan distandardkan
Banyak layanan dan proses kerja belum didukung aplikasi terintegrasi atau belum berbasis proses bisnis yang jelas.
5. Pengelolaan TIK belum optimal
Infrastruktur Jaringan, Pusat Data, aplikasi, dan keamanan informasi belum dikelola secara terpusat dan berstandar, termasuk belum optimalnya manajemen risiko dan audit TIK.
6. Belum adanya Kolaborasi Penerapan SPBE

belum adanya kolaborasi dengan pihak eksternal pemerintah kabupaten, seperti akedemisi maupun swasta sehingga pemanfaatan SPBE untuk publik kurang efektif.

Alternatif Solusi

Alternatif Solusi yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut permasalahan penyebab kegagalan adalah sebagai berikut:

1. Sentralisasi Perencanaan Anggaran SPBE
2. Sistem pemantauan realisasi dan kesesuaian anggaran terhadap roadmap SPBE.
3. Penerapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Terintegrasi
4. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga sertifikasi untuk peningkatan kompetensi SDM TIK
5. Pengembangan aplikasi terintegrasi berbasis kebutuhan proses bisnis
6. Monitoring jaringan, aplikasi, dan keamanan secara real-time

Program dan Kegiatan Pendukung

Untuk menunjang ketercapaian Indeks Tata Kelola SPBE dan Indeks Layanan SPBE, program aplikasi informatika memiliki beberapa kegiatan dan hasil yang dilaksanakan antara lain :

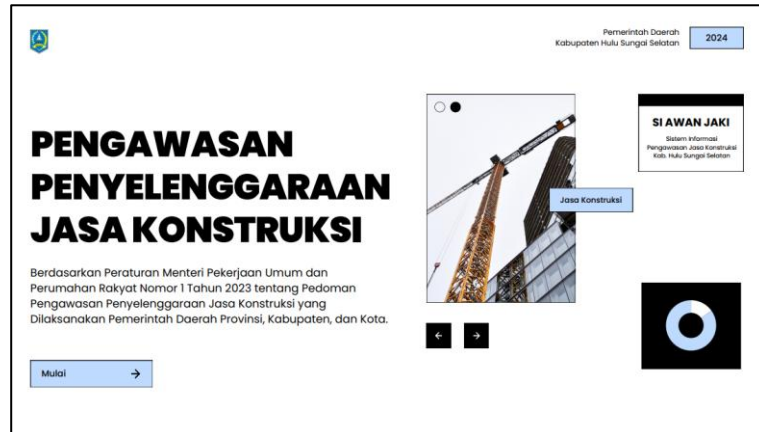
- 1) Pengeloaan Domain pemerintah hulusungaiselatankab.go.id serta 25 subdomainnya.

The image shows a screenshot of the official website of Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). The website header includes the title "PORTAL PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN" and the subtitle "Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan". Below the header, there is a section titled "DAFTAR SITUS RESMI" (Official Site List) with four icons representing different services: WEB PEMKAB, WEB SKPD, E-KINERJA, and SIOPEN.

dahabaratkec	A	300	103.51.107.25
dahaselatankec	A	300	103.51.107.25
dahautarkec	A	300	103.51.107.25
databkddiklat	A	300	103.51.107.25
desadigital	A	300	36.91.27.134

Gambar 3.9 Tampilan website dan pengelolaan domain resmi pemkab

2) Pengembangan Aplikasi sebanyak 3 Aplikasi berupa aplikasi



Gambar 3.10 Tampilan pengembangan aplikasi

3) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE sebanyak 4 Kegiatan



Gambar 3.11 Rapat Koordinasi dan Evaluasi SPBE

4) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Smart City sebanyak 2 Kegiatan.



Gambar 3.12 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Smartcity

- 5) Peningkatan kapasitas 8 orang SDM di bidang TIK dengan memberikan bimtek dan sertifikasi jaringan Internet;



Gambar 3.13 Peningkatan kapasitas 8 orang SDM TIK

- 6) Pelaksanaan Audit TIK oleh Inspektorat Daerah Kabupaten sebanyak 4 Kegiatan

Laporan Lengkap Audit Periode Tahun 2025

Lembar Pengesahan
Nama : FAKHRULLAH OZMA, S.Sos, M.AP
Jabatan/kompetensi : Auditor Inspektorat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
NIP : 19840921 200604 1 001

Tim Audit SPBE dengan ini menyatakan bahwa hasil audit SPBE yang disampaikan dalam Laporan ini mengandung informasi sesuai dengan yang diperoleh pada waktu pelaksanaan audit. Penggunaan informasi tersebut untuk hal-hal yang bukan merupakan tujuan audit ini dilaksanakan, merupakan tanggung jawab pihak yang menggunakan informasi tersebut dan tidak menjadi tanggung jawab Tim Audit.

TIM AUDIT INTERNAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

1. **Pengarah/ Pimpinan Lembaga Audit**
 KIKI RACHMAWATI, S.T., M.T., CGCAE. : Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. **Lead Auditor Aplikasi E-MONEV**
 FAKHRULLAH OZMA, S.Sos, M.AP : Auditor Inspektorat Daerah Kab. HSS
3. **Anggota Tim Auditor Aplikasi E-MONEV**

MUHAMMAD FAHMI, S.Kom.	: Pranata Komputer RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan
ERPAN FIRDAUS ABRARI, S.Kom.	: Pranata Komputer RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan
DIDIK ENGGAR PRASTYO, S.Kom.	: Pranata Komputer RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan

Kandangan, 14 Agustus 2025
INSPEKTUR DAERAH,

KIKI RACHMAWATI, S.T., M.T., CGCAE.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790813 200804 2 002

Gambar 3.14 Laporan Audit TIK

2) Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Layanan SPBE	5	4,82	96,4

Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Capaian Indeks Layanan SPBE tahun 2025 sebesar 4,82. Capaian tersebut lebih rendah dari target yaitu 5, dengan capaian sebesar 96,4%.

Domain Layanan SPBE	4,82
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	5,00

Pengukuran Indeks Layanan SPBE terdiri dari 3 aspek dengan rincian dan hasil untuk tahun 2025 sebagai berikut:

a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

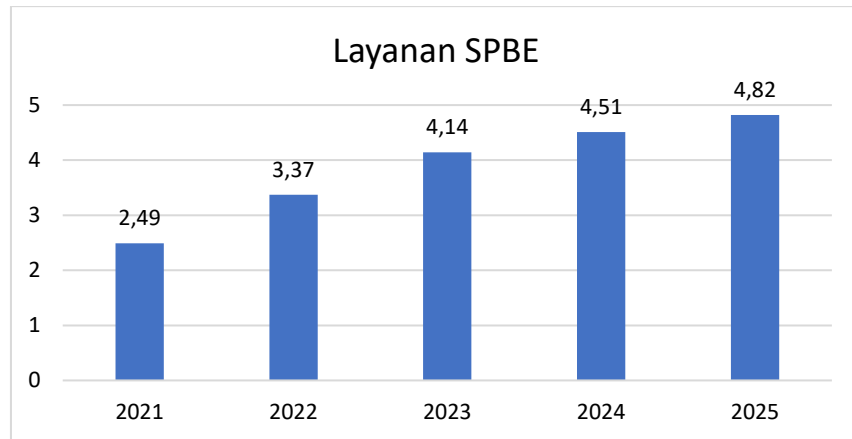
Kematangan layanan Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai sudah mencapai nilai maksimal disetiap layanan sudah menerapkan sistem berbasis elektronik yang terintegrasi dan terus dievaluasi.

Aspek yang belum optimal terdapat pada Layanan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah karena belum terintegrasinya dengan layanan lain, dan belum dievaluasi secara berkala.

b. Layanan Publik Berbasis Elektronik

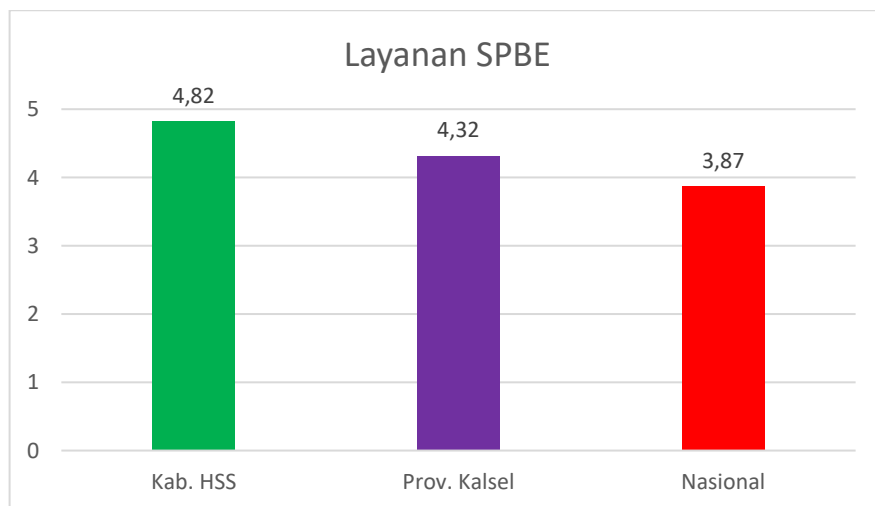
Pada aspek ini kematangan seluruh layanan berupa layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Layanan Perizinan sudah mendapat nilai maksimal karena terintegrasinya layanan dengan layanan lain, serta dievaluasi secara berkala.

Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



Gambar 3.15 Nilai Indeks Layanan SPBE tahun 2021-2025

Capaian Indeks Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan dengan capaian provinsi dan capaian nasional sebagai berikut:



Gambar 3.16 Nilai Indeks Layanan SPBE Kab. HSS, Prov Kalsel dan Nasional

Pada sasaran Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik penggunaan Indikator Indeks Layanan SPBE dilakukan sampai dengan tahun 2025, untuk tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 (akhir renstra) digunakan indikator Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah karena adanya Pergantian Pengukuran Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Analisis penyebab kegagalan

Capaian Indeks Layanan SPBE pada Tahun 2025 tidak mencapai target disebabkan :

- Belum terintegrasinya dua layanan internal pemerintah yaitu Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengawasan Internal

Pemerintah, sehingga layanan tersebut berjalan belum optimal. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien, data tidak sinkron, serta belum mendukung konsep layanan terpadu berbasis digital.

Alternatif Solusi

- Alternatif Solusi yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut permasalahan penyebab kegagalan adalah pengintegrasiaan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah serta evaluasi terhadap layanan tersebut secara berkala.

Program dan Kegiatan Pendukung

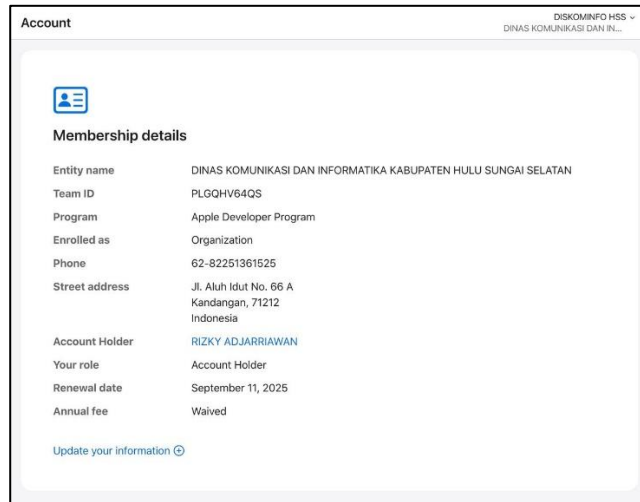
Untuk menunjang ketercapaian Indeks Layanan SPBE, program aplikasi informatika memiliki beberapa kegiatan dan hasil yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengelolaan Domain pemerintah hulusungaiselatankab.go.id serta 25 subdomainnya.

Domain	Status	IP Address
dahabaratkec	A	103.51.107.25
dahaselatankec	A	103.51.107.25
dahautarakec	A	103.51.107.25
databkddiklat	A	103.51.107.25
desadigital	A	36.91.27.134

Gambar 3.17 Tampilan website dan pengelolaan domain resmi pemkab

- 2) Perpanjangan dan pembelian 4 lisensi untuk mendukung pengembangan aplikasi dan Pusat Data;



Gambar 3.18 Tampilan lisensi pendukung pengembangan aplikasi

- 3) Penyediaan bandwidth minimal 50 Mbps selama 1 tahun untuk memfasilitasi kebutuhan internet OPD, Kecamatan, serta UPTD se Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 144 Titik layanan internet;

No	Pelanggan	Titik	SID	NO TELP
1	BADAN KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEREMPUAN	DPPKBPPPA	162219200793	051724023
2	BADAN KEUANGAN DAERAH KAB HSS	BPKPD 2	162219201359	05172032762
3	BADAN PB KESBANGPOL	KESBANGPOL 1	162219200648	051722276
4	BANK SAMPAH INDUK HSS	BANK SAMPAH	162219201888	
5	BAPPELITBANGDA KANDANGAN	BAPPELITBANGDA	162219206369	05173714801
6	DEPO ARSIP HULU SUNGAI SELATAN	WIFI PUBLIK LAMANG	162219201355	051722719
7	DINAS DUKCAPIL KAB HSS	DISDUKCAPIL 1	162219201157	
8	DINAS DUKCAPIL KAB HSS	DISDUKCAPIL 2	162219201708	

Gambar 3.19 Penyediaan bandwidth

3) Sasaran: Meningkatnya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90,35	95,34	105,52

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar Terhadap Informasi Pemerintah Daerah sebesar 95,34.

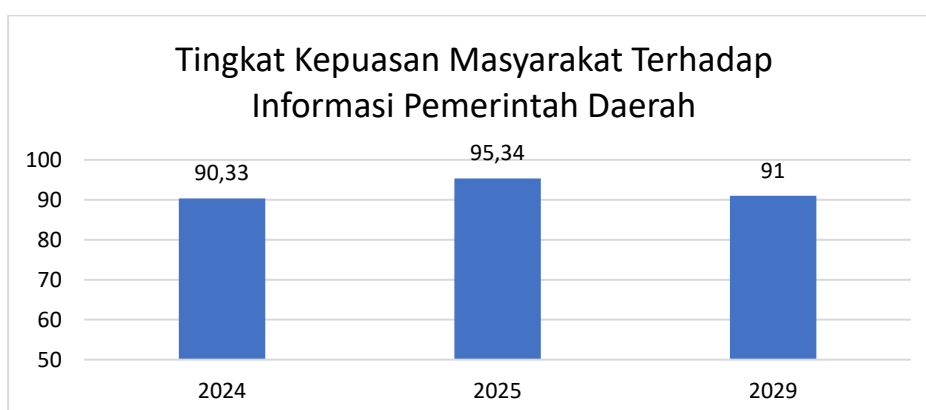
Tabel 3.2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Jenis Layanan	Jumlah Respon- den	Persyar- atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila- ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
Pelayanan, Akses dan Kualitas Informasi Publik	169	94.30	94.92	96.45	95.96	96.75	96.45	94.77	94.23	94.20	95.34
Rerata IKM Per Unsur		94.30	94.92	96.45	95.96	96.75	96.45	94.77	94.23	94.20	95.34
IKM Unit Layanan	95.34										
Mutu Unit Layanan	A										

Dengan capaian Nilai sebesar 95,34 dari target Kinerja 90,35 maka capaian pada indikator tersebut sebesar 105,52%.

Dari laporan tersebut dapat diidentifikasi bahwa aspek persyaratan layanan dan perilaku pelaksana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Aduan mendapatkan nilai terendah yaitu 94.23. Selanjutnya sarpras yang mendapatkan nilai 94.26 adalah nilai terendah kedua. Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa persyaratan layanan dirasa terlalu banyak, rumit, dan terkesan birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang kurang ramah, tidak komunikatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

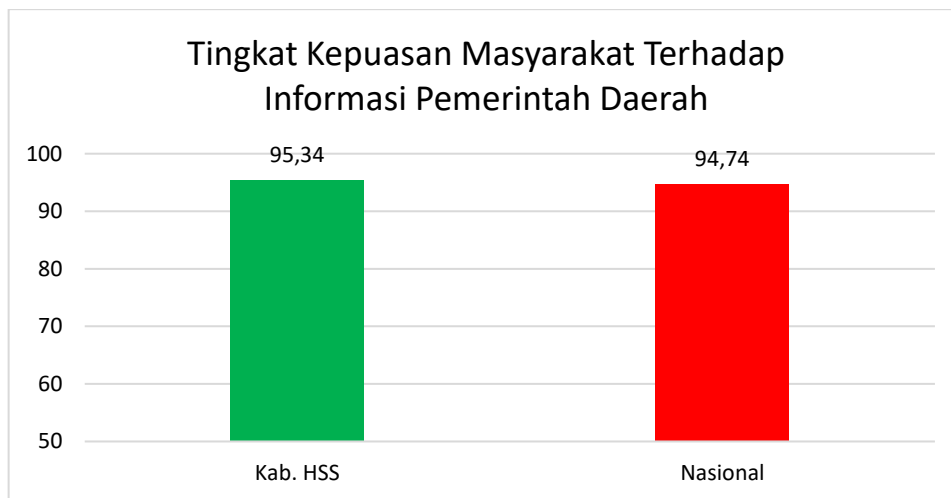
Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian tahun 2025 mengalami kenaikan dari capaian tahun 2024 dengan capaian sebesar 90,33 serta dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2029 sebesar 91, capaian tahun 2025 telah mencapai 104,76%.



Gambar 3.20 Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Tahun 2024 s.d 2025 dan target Tahun 2029

Dibandingkan dengan capaian nasional, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah lebih tinggi dari Tingkat Kepuasan

Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah Nasional dengan capaian 94,74.



Gambar 3.21 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah Kab. HSS dan Nasional

Analisis penyebab keberhasilan

Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 mencapai target disebabkan :

- Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai kanal informasi seperti website resmi, media sosial, website PPID serta layanan informasi publik lainnya yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Ketersediaan informasi yang terbuka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- Pengelolaan layanan informasi telah dilaksanakan secara lebih sistematis melalui penerapan standar pelayanan, prosedur layanan informasi publik, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini meningkatkan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.
- Penggunaan portal informasi, aplikasi layanan publik, serta kanal digital yang responsif dan terintegrasi;
- Aparatur yang memahami tata kelola informasi, pelayanan publik, dan komunikasi publik.

Program dan Kegiatan Pendukung

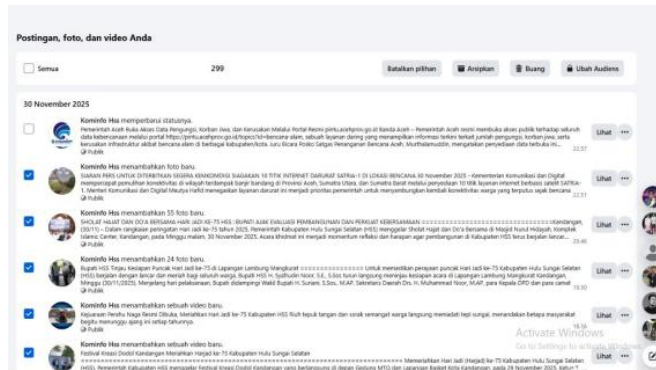
Untuk menunjang ketercapaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dalam program informasi dan komunikasi publik memiliki fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, penyediaan konten dan akses informasi dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1) Peliputan kegiatan pemerintah daerah dalam 1 tahun



Gambar 3.22 Kegiatan Peliputan

2) Penyusunan dan publikasi program-program Pemerintah Daerah melalui dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah, radio, media online, media cetak, televisi, media sosial, dan youtube sebanyak 2523 Informasi.



Gambar 3.23 Penyusunan dan Publikasi Informasi

3) Bekerjasama dengan 11 media online, 5 media cetak, 2 media radio, 3 media televisi dalam rangka kerjasama publikasi program-program pemerintah



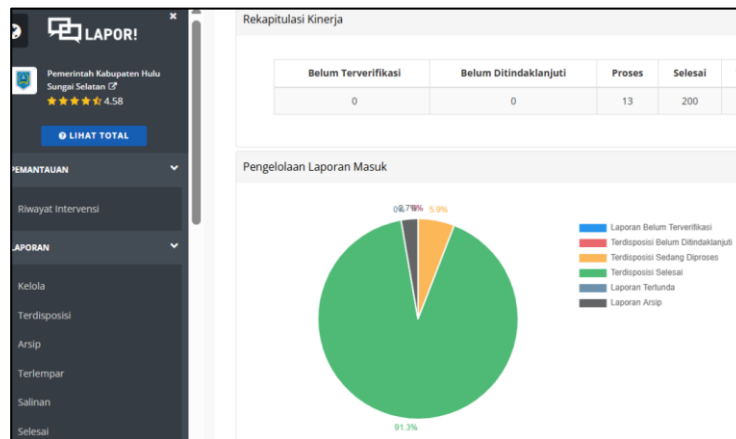
Gambar 3.24 Publikasi Informasi pada Media

- 4) Pengelolaan Videotron sebanyak 1 Buah dan baliho sebanyak 1 Buah sebagai sarana publikasi informasi.



Gambar 3.25 Sarana Informasi Videotron

- 5) Pengelolaan Layanan Pengaduan, sebanyak Pengaduan



Gambar 3.26 Tampilan dashboard layanan pengaduan

Sebagai penunjang ketercapaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dalam Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdapat beberapa kegiatan dan hasil yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Perencanaan dan Pengumpulan Ewali Data



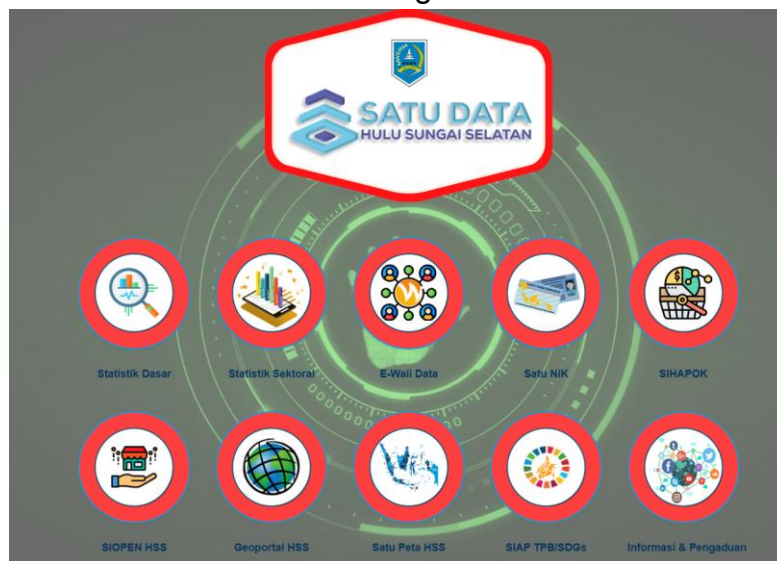
Gambar 3.27 Kegiatan Perencanaan dan Pengumpulan Ewali Data

2) Pelaksanaan Perencanaan dan Pengumpulan Sata Sektoral



Gambar 3.28 Kegiatan Perencanaan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral

3) Pengelolaan Portal Satu Data Hulu Sungai Selatan



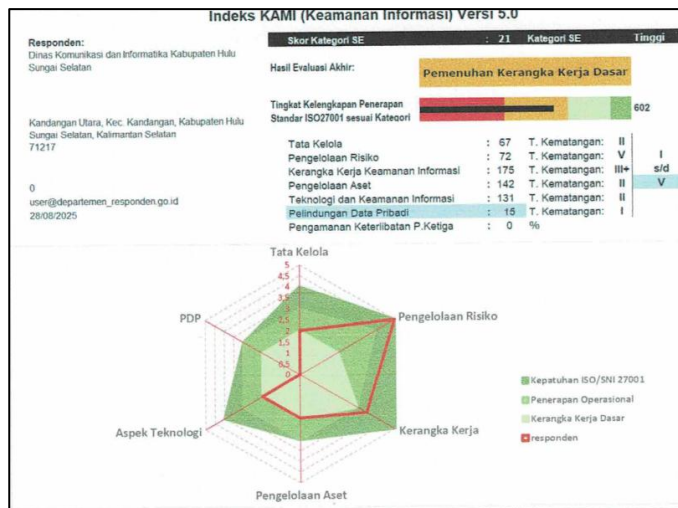
Gambar 3.29 Tampilan dashboard satu data

4) Sasaran: Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Keamanan Informasi	461	602	130,59

Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Tahun 2025, Nilai Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 602.

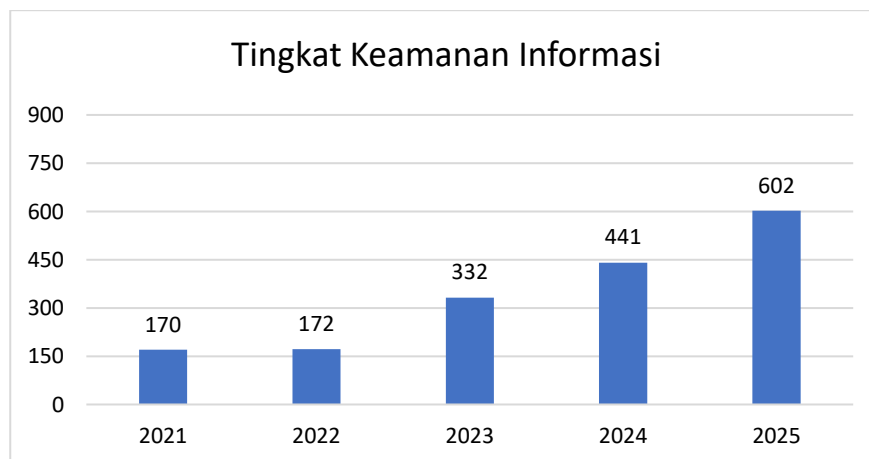


Gambar 3.30 Nilai Indeks KAMI tahun 2025

Dengan capaian Nilai sebesar 602 dari target Kinerja 461 maka capaian pada indikator tersebut sebesar 131%.

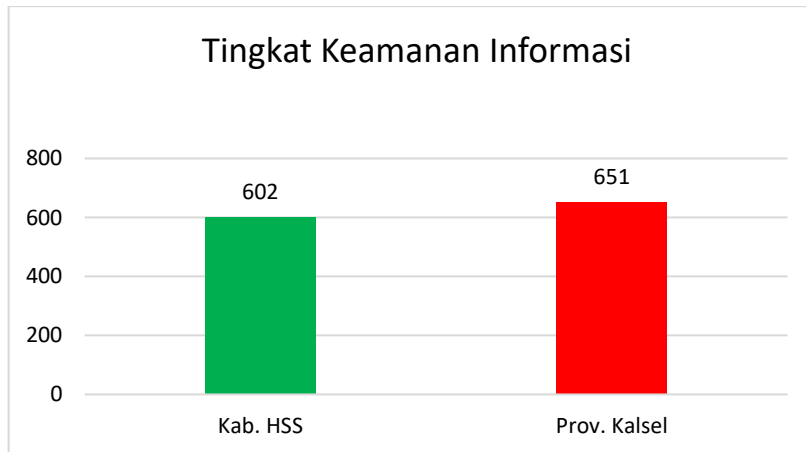
Dari capaian Tingkat Keamanan Informasi tersebut terdapat beberapa kategori yang tingkat kematangannya sudah tinggi diantaranya Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja. Sedangkan aspek yang belum optimal diantaranya Pengelolaan Aset, Teknologi dan Perlindungan Data Pribadi.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian tahun 2025 mengalami kenaikan dari capaian tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3.31 Nilai Tingkat Keamanan Informasi Tahun 2021 s.d 2025

Untuk Tingkat Keamanan Informasi nasional tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan dibandingkan dengan capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih rendah dari Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian sebesar 651.



Gambar 3.32 Nilai Tingkat Keamanan Informasi Kab. HSS dan Prov Kalsel

Analisis penyebab keberhasilan

Capaian Tingkat Keamanan Informasi pada Tahun 2025 mencapai target disebabkan :

- Penerapan Indeks KAMI versi terbaru sebagai instrumen evaluasi yang lebih komprehensif;
- Dukungan sosialisasi, pendampingan, dan verifikasi dari instansi pembina;
- Peningkatan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia;
- Pemanfaatan hasil evaluasi sebelumnya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Program dan Kegiatan Pendukung

Sebagai penunjang ketercapaian Tingkat Keamanan Informasi, dalam Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdapat beberapa kegiatan dan hasil yang dilaksanakan antara lain :

1) Monitoring Sertifikat Keamanan Website dan Aplikasi

Domain	IP Address	SSL Valid	CA Penerbit	Tar
ngaiselatankab.go.id		Ya		
tankab.go.id		Ya		
inkab.go.id		Ya		
lusungaiselatankab.go.id		Ya		
latankab.go.id		Ya		
selatankab.go.id		Kadaluarsa		
usungaiselatankab.go.id		Ya		
sungaiselatankab.go.id		Kadaluarsa		
atankab.go.id		Ya		
elatankab.go.id		Kadaluarsa		
elatankab.go.id		Ya		
iselatankab.go.id		Ya		
atankab.go.id		Ya		
atankab.go.id		Kadaluarsa		
ngaiselatankab.go.id		Ya		
atankab.go.id		Ya		
sungaiselatankab.go.id		Ya		

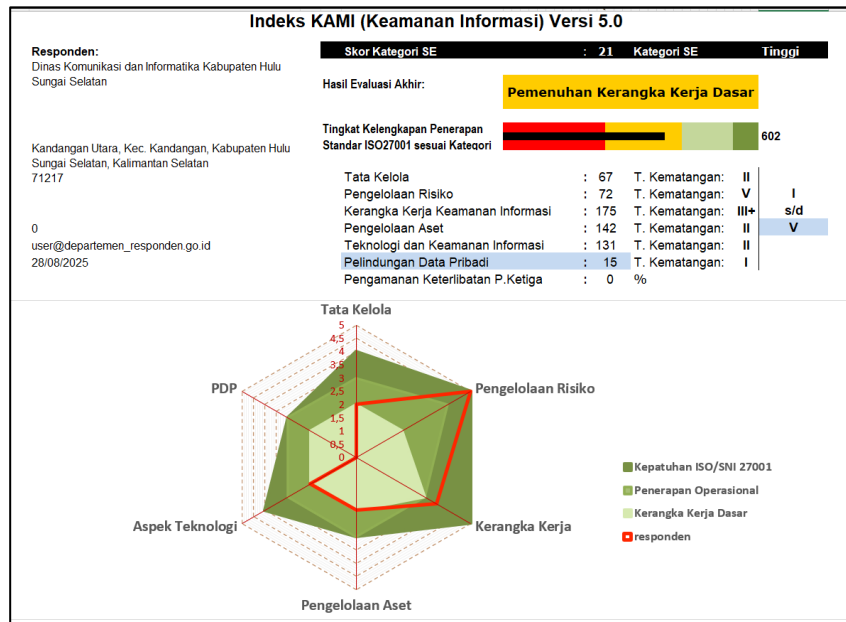
Gambar 3.33 Monitoring Sertifikat Keamanan

2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan Keamanan Informasi



Gambar 3.34 Rapat Evaluasi Penerapan Keamanan Informasi

3) Pelaksanaan Evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025



Gambar 3.35 Hasil Evaluasi Indeks KAMI

4) Penerbitan dan perpanjangan sertifikat tanda tangan elektronik elektronik

JABATAN	INSTANSI	STATUS AKUN
Spala Bidang Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik	RSUD Bngjend H. Hasan Basry	Verified
Administrator Kesehatan Ahli Madya	RSUD Bngjend H. Hasan Basry	Verified
Administrator Kesehatan/Subkoordinator Hukum, Humas Dan Promkes	RSUD Bngjend H. Hasan Basry	Verified
Spala Bidang Keperawatan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Verified
Spala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Verified
Spala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Bidang Pengelolaan Persampahan	Verified
Spala Bidang Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Verified
Spala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Verified
Spala Bidang Persandian	Diskominfo	Verified
Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Verified
Spala Dinas	Diskominfo	Verified
Spala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Verified
Sekretaris Badan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Verified
Spala Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Verified
Spala Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Verified
Spala Sub Bagian Perencanaan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Verified

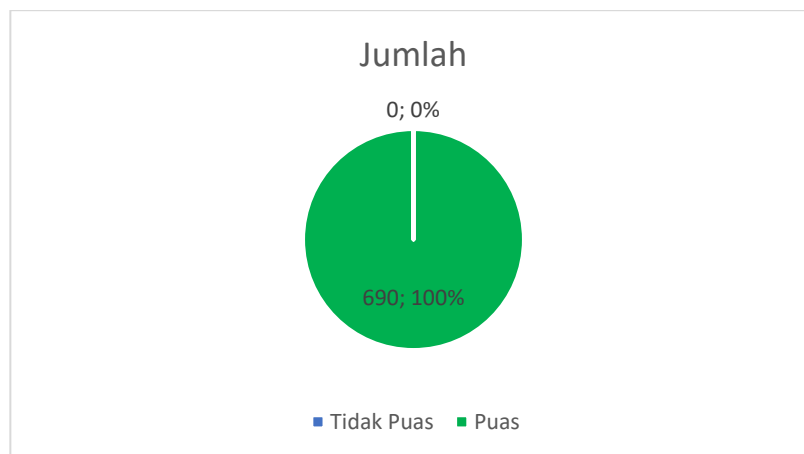
Gambar 3.36 Tampilan sertifikat tanda tangan elektronik elektronik

5) Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100	100	100

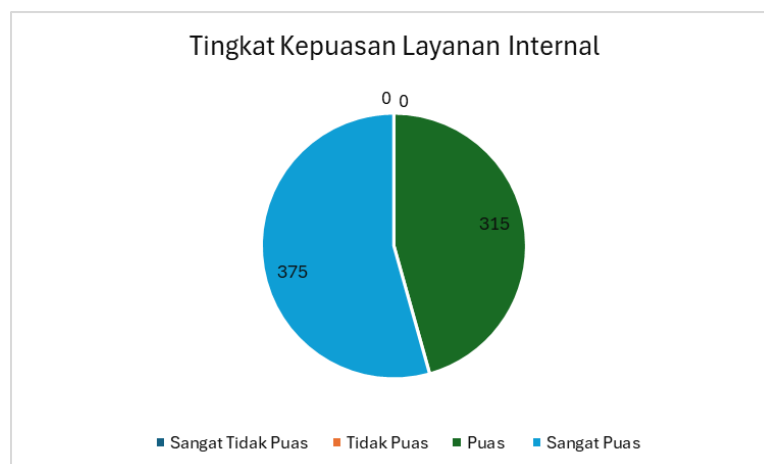
Berdasarkan Hasil Survey terhadap Layanan Internal Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperoleh Tingkat Kepuasan persentase kepuasan pegawai terhadap pada layanan internal sebesar 100%.



Gambar 3.37 Hasil Survey terhadap Layanan Internal Tahun 2025

Dengan capaian Nilai sebesar 100% dari target Kinerja 100% maka capaian pada indikator tersebut sebesar 100%.

Dari 16 layanan internal yang diajukan kepada responden setiap unsur relative memiliki nilai kepuasan yang sama. Untuk nilai rata-rata unsurnya yaitu 3,53. Untuk konversi nilai dari Survei kepuasan pegawai ini berada pada nilai 88,25 masuk dalam kategori Baik. Untuk persentase kepuasan pegawai terhadap pada layanan internal sebesar 100% dengan 0 Jawaban Sangat Tidak Puas, 0 Jawaban Tidak Puas, 315 Jawaban Puas dan 357 Jawaban Sangat Puas.



Gambar 3.38 Jawaban Survey terhadap Layanan Internal Tahun 2025

Dari laporan tersebut dapat diidentifikasi bahwa aspek persyaratan layanan dan perilaku pelaksana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Aduan mendapatkan nilai terendah yaitu 94.23. Selanjutnya sarpras yang mendapatkan nilai 94.26 adalah nilai terendah kedua. Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa persyaratan layanan dirasa terlalu banyak, rumit, dan terkesan birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang kurang ramah, tidak komunikatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Analisis penyebab keberhasilan

Capaian Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah pada Tahun 2025 mencapai target disebabkan :

- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem informasi internal, jaringan, dan fasilitas kerja yang memadai;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan (e-office, helpdesk internal, aplikasi layanan kepegawaian);

Program dan Kegiatan Pendukung

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan penunjang ketercapaian Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertujuan : meningkatkan pengelolaan SDM, peningkatan infrastruktur dan penguatan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa kegiatan yang dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan 8 dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2) Penyusunan 1 laporan capaian kinerja;
- 3) Penyusunan 2 laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran dan tahunan;
- 4) Penyediaan gaji dan tunjangan bagi 42 ASN selama 1 tahun;
- 5) Penyediaan Listrik dan Air selama 1 tahun.
- 6) Pengadaan Mebel berupa 1 paket meja dan kursi kantor untuk kebutuhan pelaksanaan kerja;
- 7) Penyediaan 1 paket peralatan rumah tangga untuk alat dan peralatan pendingin ruangan;
- 8) Penyediaan Peralatan Komputer sebanyak 1 unit sebagai penunjang pelaksanaan kerja
- 9) Penyediaan logistik kantor selama 1 tahun.
- 10) Pemeliharaan dan pembayaran pajak untuk 8 unit kendaraan dinas roda 2 dan 4 unit roda 4;

- 11) Pemeliharaan 3 unit laptop, 11 dan 11 unit AC;
- 12) Pemeliharaan 2 unit gedung bangunan diantaranya : gedung kantor Kominfo dan Studio HSS TV.
- 13) Penyediaan honor tenaga kontrak untuk 1 tahun dalam rangka pencapaian kinerja untuk memenuhi kebutuhan SDM.

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika ditandai dengan ketercapaian target yang ditentukan tahun 2025 dengan ketercapaian rata-rata target Indikator Kinerja Utama sebesar 102,6%. Efisiensi dapat diukur dari penggunaan dana maksimal sama atau lebih kecil dari pagu yang ditentukan. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 100 % lebih di tahun 2024, realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 10.677.648.313,- atau 81,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 12 % dalam pencapaian kinerja.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas anggaran} &= \frac{\text{Rp. 10.677.648.313}}{\text{Rp. 13.028.659.550}} \times 100\% \\ &= 81,96\% \end{aligned}$$

Efektivitas tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun masih perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025 pada indikator yang capaiannya 100% atau lebih dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Faktor Penyebab Efisiensi
1	Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90,35	95,34	105,52	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.743.716.450	3.495.358.189	93,37	- Penggunaan website dan Media sosial dalam publikasi, sehingga dapat mengurangi publikasi pada pihak ke tiga
2	Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	461	602	130,59	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	232.439.850	174.853.894	75,23	- Kegiatan penguatan SDM Persandian dilaksanakan oleh BSRI sehingga penggunaan anggaran pelatihan dapat diefisiensi
3	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100	100	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatenkota	5.963.990.117	4.834.078.348	81,05	- Penggunaan Aplikasi online dalam surat menyurat ataupun administrasi lainnyadapat mengefisiensi penggunaan Alat tulis kantor dan jasa surat menyurat

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 3.4 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja berorientasi pada hasil sesuai dengan levelnya dengan tetap memperhatikan logical framework serta CSF yang ada pada pohon kinerja perangkat daerah sehingga program dan kegiatan yang disusun efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran	Melaksanakan reviu internal logical framework, CSF, dan pohon kinerja, serta merevisi dokumen perencanaan kinerja sesuai hasil reviu	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Sudah dilaksanakan rapat internal terkait reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja.
2	Memastikan setiap rincian anggaran pada sub kegiatan, kegiatan dan program sudah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran	Melakukan reviu terhadap DPA agar tujuan dan sasaran pada sub kegiatan, kegiatan dan program berjalan sesuai target.	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Melaksanakan rapat rutin setiap bulan untuk mengetahui sejauh mana keselarasan antara capaian tujuan dan sasaran.
3	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memastikan proses input terhadap realisasi rencana aksi	Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap bulan pada semua bidang dan sekretariat serta optimalisasi	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Setiap bidang dan sekretariat menyampaikan laporan kemajuan kegiatan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	sesuai dengan timeframe yang sudah ditetapkan	penggunaan aplikasi E-Sakip untuk pelaporan.		setiap bulannya kepada Kepala Dinas.
4	Melakukan reviu dan perbaikan terhadap target kinerja setiap triwulan terutama pada level taktikal dan operasional melalui aplikasi E-SAKIP sehingga setiap capaian kinerja triwulan dapat menunjukkan dan mencerminkan progress pencapaian kinerja	Melakukan penyesuaian target triwulanan pada aplikasi E-SAKIP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta melakukan pelatihan penginputan data capaian bagi PIC aplikasi pada masing-masing bidang	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Rapat Evaluasi Triwulanan secara berkala
5	Menambahkan informasi peran-peran lintas sektor yang turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja dan informasi inovasi yang mendukung capaian kinerja.	Melakukan inventarisasi kontribusi pihak eksternal dalam mendukung kinerja organisasi, dan memasukkannya dalam laporan kinerja tahunan (LKj)	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Rapat internal pengumpulan data kontribusi pihak eksternal dalam mendukung kinerja organisasi
6	Pada Bab Penutup perlu disampaikan kesimpulan umum capaian kinerja.	Menyusun ringkasan capaian kinerja strategis yang diinput dalam bab penutup LKj	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Penyusunan ringkasan capaian kinerja strategis yang telah ditampilkan pada BAB III ke dalam BAB PENUTUP
7	Memberikan penghargaan kepada karyawan dengan kinerja terbaik secara berkala untuk meningkatkan implementasi budaya berkinerja.	Melakukan penilaian kinerja pada ASN Dinas Kominfo dan memberikan reward kepada ASN dengan kinerja terbaik	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan	Memberikan sertifikat terhadap ASN berkinerja baik pada Diskominfo dan selanjutnya diusulkan pada penilaian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
				ASN Berakhlak Kabupaten

3.5 Rekomendasi perbaikan Kinerja/ Rencana tindak lanjut di tahun 2026

Berdasarkan uraian analisis kinerja dapat disusun rekomendasi/rencana tindak lanjut di tahun 2026 untuk peningkatan kinerja sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Rekomendasi perbaikan Kinerja/ Rencana tindak lanjut di tahun 2026

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/RTL
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpadunya rencana dan anggaran SPBE Dokumen seperti arsitektur dan peta rencana SPBE sudah tersedia tetapi penganggaran untuk SPBE masih tersebar di masing-masing perangkat daerah dan belum berpatokan pada arsitektur dan peta rencana SPBE. 2. Koordinasi Inovasi Proses Bisnis SPBE antar unit kerja lemah Pelaksanaan SPBE masih berjalan sektoral belum terintegrasi antar OPD/unit, sehingga setiap layanan proses bisnis perangkat daerah berjalan masing-masing. 3. Keterbatasan SDM TIK dan pemahaman SPBE Jumlah dan kompetensi SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan RPJMD 2025-2029 2. Melakukan Pemetaan Proses Bisnis setiap Perangkat Daerah 3. Melakukan Pemetaan SDM TIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Peraturan/ kebijakan mengenai rencana dan anggaran SPBE 2. Membuat system portal layanan terintegrasi 3. Melakukan pelatihan peningkatan SDM TIK 4. Membuat SOP mengenai tata Kelola infrastuktur dan aplikasi SPBE 5. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/RTL
		<p>pengelola SPBE belum memadai, termasuk kurangnya pemahaman terhadap indikator penilaian SPBE.</p> <p>4. Proses bisnis belum terdigitalisasi dan distandardkan Banyak layanan dan proses kerja belum didukung aplikasi terintegrasi atau belum berbasis proses bisnis yang jelas.</p> <p>5. Pengelolaan TIK belum optimal Infrastruktur Jaringan, Pusat Data, aplikasi, dan keamanan informasi belum dikelola secara terpusat dan berstandar, termasuk belum optimalnya manajemen risiko dan audit TIK.</p> <p>6. Belum adanya Kolaborasi Penerapan SPBE belum adanya kolaborasi dengan pihak eksternal pemerintah kabupaten, seperti akedemisi maupun swasta sehingga pemanfaatan SPBE untuk publik kurang efektif.</p>		
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE	Belum terintegrasinya dua layanan internal pemerintah yaitu Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, sehingga layanan tersebut berjalan belum optimal. Hal ini	Melakukan evaluasi terhadap Aplikasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan	Melakukan integrasi dan perbaikan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/RTL
		menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien, data tidak sinkron, serta belum mendukung konsep layanan terpadu berbasis digital.	Pengawasan Internal Pemerintah	
Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai kanal informasi seperti website resmi, media sosial, website PPID serta layanan informasi publik lainnya yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Ketersediaan informasi yang terbuka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 2. Pengelolaan layanan informasi telah dilaksanakan secara lebih sistematis melalui penerapan standar pelayanan, prosedur layanan informasi publik, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini meningkatkan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat. 3. Penggunaan portal informasi, aplikasi layanan publik, serta kanal digital yang responsif dan terintegrasi; 	melakukan evaluasi berkala untuk memastikan peningkatan yang lebih konsisten.	penguatan kapasitas SDM, pemutakhiran sarana pendukung, dan penyederhanaan prosedur juga akan menjadi fokus agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan tepat sasaran. Dengan dorongan umpan balik pengguna, diharapkan pelayanan publik ke depan dapat tumbuh seperti aliran sungai yang terus mengalir membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/RTL
		4. Aparatur yang memahami tata kelola informasi, pelayanan publik, dan komunikasi publik.		
Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Indeks KAMI versi terbaru sebagai instrumen evaluasi yang lebih komprehensif; 2. Dukungan sosialisasi, pendampingan, dan verifikasi dari instansi pembina; 3. Peningkatan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia; 4. Pemanfaatan hasil evaluasi sebelumnya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. 	Pelatihan keamanan siber, literasi digital, dan manajemen risiko TIK;	Melakukan Peningkatan Penerapan Standar pada Aspek-aspek yang masih lemah, yaitu pada tata Kelola, pengelolaan asset dan perlindungan data pribadi, serta melakukan Penggunaan enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan sistem pemantauan keamanan
Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem informasi internal, jaringan, dan fasilitas kerja yang memadai; 2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan (e-office, helpdesk internal, aplikasi layanan kepegawaian); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan internal secara berkala. 2. sosialisasi standar layanan kepada seluruh pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan internal. 1. Menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan layanan internal. 2. Mendorong penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap proses layanan.

3.6 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada APBD murni sebesar Rp.13.428.987.349,- dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 13.028.659.550,-.

Capaian kinerja keuangan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 10.677.648.313,- atau 81,96%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatenkota	5.963.990.117	4.834.078.348	81,05
Kegiatan :Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.748.000	7.650.000	65,12
Sub Kegiatan :Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.332.000	4.275.000	58,31
Sub Kegiatan :Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.416.000	3.375.000	76,43
Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.086.935.691	4.192.551.626	82,42
Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	5.082.165.691	4.191.278.726	82,47
Sub Kegiatan :Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanantriwulanansemasteran Skpd	4.770.000	1.272.900	26,69
Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	14.800.000	74
Sub Kegiatan :Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	20.000.000	14.800.000	74
Kegiatan :Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.791.066	253.750.026	77,41
Sub Kegiatan :Penyediaan Komponen Instalasi Listrikpenerangan Bangunan Kantor	3.819.250	3.736.680	97,84
Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.369.002	33.605.400	49,15
Sub Kegiatan :Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	13.689.580	7.844.400	57,30
Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	13.687.500	5.590.000	40,84
Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	162.000.000	143.823.546	88,78
Sub Kegiatan :Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	66.225.734	59.150.000	89,32
Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.487.200	281.532.700	84,67
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Surat Menyurat	374.000	-	0
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	195.160.200	182.081.172	93,30
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.953.000	99.451.528	72,62

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.028.160	83.793.996	45,29
Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.200.000	79.993.996	68,25
Sub Kegiatan :Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	27.828.160	3.800.000	13,66
Sub Kegiatan : Pemeliharaanrehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	40.000.000	-	0
Program : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.743.716.450	3.495.358.189	93,37
Kegiatan :Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupatenkota	3.743.716.450	3.495.358.189	93,37
Sub Kegiatan :Diseminasi Informasi	1.093.321.190	947.483.839	86,66
Sub Kegiatan :Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.650.395.260	2.547.874.350	96,13
Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.994.718.987	2.089.934.850	69,79
Kegiatan :Pengelolaan E Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupatenkota	2.994.718.987	2.089.934.850	69,79
Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	31.800.000	3.000.000	9,43
Sub Kegiatan :Pembangunan Danatau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah	252.606.125	210.246.477	83,23
Sub Kegiatan :Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten Atau Kota Cerdas	322.462.862	149.679.817	46,42
Sub Kegiatan :Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Spbe	2.146.850.000	1.727.008.556	80,44
Sub Kegiatan :Koordinasi Penyusunan Dan/Atau Reviu Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah	241.000.000	-	0
Program :Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.794.146	83.423.032	88,94
Kegiatan :Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupatenkota	93.794.146	83.423.032	88,94
Sub Kegiatan :Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	93.794.146	83.423.032	88,94
Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	232.439.850	174.853.894	75,23
Kegiatan :Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupatenkota	232.439.850	174.853.894	75,23

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Sub Kegiatan :Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupatenkota	65.890.250	63.167.978	95,87
Sub Kegiatan :Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupatenkota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	138.974.600	86.798.416	62,46
Sub Kegiatan :Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupatenkota	27.575.000	24.887.500	90,25
JUMLAH	13.028.659.550	10.677.648.313	81,96

Faktor Penghambat Realisasi Anggaran :

- 1) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi anggaran sebesar 0% karena proses surat menyurat menggunakan Sistem online.
- 2) Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya realisasi anggaran sebesar 0% karena proses Pengadaan Konsultan Perencanaan Rehab Bangunan Gedung tidak dilaksanakan disebabkan untuk tahun 2026 tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan rehab gedung.
- 3) Pada Sub Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah realisasi anggaran sebesar 4,23% karena penyediaan pemeliharaan pusat data direalisasikan berdasarkan perbaikan kerusakan.
- 4) Pada Sub Koordinasi Penyusunan Dan/Atau Reviu Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah realisasi anggaran sebesar 0% karena Jasa Konsultan Penyusunan Arsitektur dan SPBE tidak dilaksanakan disebabkan adanya perubahan Arsitektur SPBE menjadi Pemerintah Digital dan belum ditetapkannya Arsitektur Pemerintah Digital Pemerintah Pusat sebagai Pedoman Arsitektur Pemerintah Digital Daerah.

3.7 Prestasi

Pada Tahun 2025 prestasi dan penghargaan yang diperoleh sebagai berikut :

- 1) Terbaik se-Provinsi Kalimantan Selatan kategori Pemerintah Kabupaten/Kota pada penilaian keterbukaan informasi publik dengan predikat "Informatif" nilai tertinggi 99,48.



Gambar 3.39 Sertifikat penghargaan penilaian keterbukaan informasi publik

2) Terbaik I Tingkat Kalsel Pengelolaan Pengaduan LAPOR!



Gambar 3.40 Sertifikat Pengelolaan Pengaduan LAPOR!

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan perlu adanya perbaikan realisasi untuk kedepannya.

Hasil laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 102,6%. Keberhasilan pencapaian pada 3 Indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai kanal informasi seperti website resmi, media sosial, website PPID serta layanan informasi publik lainnya yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Ketersediaan informasi yang terbuka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
2. Dukungan sosialisasi, pendampingan, dan verifikasi dari instansi pembina dalam pelaksanaan keamanan informasi;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem informasi internal, jaringan, dan fasilitas kerja yang memadai;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan (e-office, helpdesk internal, aplikasi layanan kepegawaian);

Sedangkan penyebab kegagalan pencapaian pada 2 indikator, antara lain:

1. Belum terpadunya rencana dan anggaran SPBE Koordinasi Inovasi Proses Bisnis SPBE antar unit kerja lemah
2. Belum terintegrasinya dua layanan internal pemerintah yaitu Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, sehingga layanan tersebut berjalan belum optimal. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien, data tidak sinkron, serta belum mendukung konsep layanan terpadu berbasis digital.

4.2 Langkah Perbaikan

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertahankan pencapaian kinerja yang baik tersebut dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan implementasi SPBE baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur, maupun integrasi sistem aplikasi dan security jaringan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, peningkatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi dan komunikasi, serta meningkatkan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media massa, media pemerintah, maupun media sosial;
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam pengembangan aplikasi layanan;
4. Peningkatan pengamanan informasi melalui jaring komunikasi sandi, sosialisasi penggunaan internet sehat dan pengawasan serta pengendalian komunikasi dan informatika;
5. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, serta pelatihan bidang teknologi informasi baik di lingkup internal maupun masyarakat.

Laporan Kinerja mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, secara umum, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 adalah baik.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi informasi secara transparan sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. HENDRO MARTONO, MT**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos**
Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 6 Oktober 2025

Pihak Pertama

Drs. HENDRO MARTONO, MT
NIP. 197303091994021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE	4.1 Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE	5 Indeks
3	Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90.35 Nilai
4	Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	461 Nilai
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %

PROGRAM	ANGGARAN
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.963.990.117,00
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 3.743.716.450,00
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2.994.718.987,00
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 93.794.146,00
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 232.439.850,00

Pihak Kedua



H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 6 Oktober 2025
Pihak Pertama



Drs. HENDRO MARTONO, MT
NIP. 197303091994021002